

MEMPERKUAT KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN MELALUI UMKM SEBAGAI PENOPANG LAJU PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

Mohamad Alen Aliansyah

Mahasiswa Prodi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
alenaliansyah@gmail.com

Abstrak: Pasca dibentuknya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau *CEDAW* oleh PBB, hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial terus muncul kepermukaan, hak yang terus mencuat adalah di bidang perekonomian. Hak perempuan dalam perekonomian mengalami perkembangan dengan perannya yang signifikan terhadap perekonomian, hal tersebut dikarenakan tuntutan perkembangan ekonomi dunia. Dalam menghadapi perkembangan dunia, pembangunan ekonomi menjadi agenda untuk mengejar perkembangan ekonomi dunia. Sehingga, tulisan ini bertujuan memperlihatkan peran kewirausahaan perempuan terhadap pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Singkatnya, dalam agenda pembangunan ekonomi harus bertumpu pada perekonomian domestik yang padat karya, oleh karena itu perlu pembenahan dan penguatan kewirausahaan perempuan.

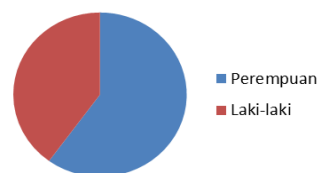
Kata Kunci: Perempuan, UMKM, Pembangunan Ekonomi

Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara berkembang, kini tengah menghadapi dua era besar perekonomian, yaitu percepatan ekonomi dunia dan arus globalisasi yang menciptakan integrasi pasar. Demi mengejar hal tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan dari berbagai lini sektor perekonomian guna menopang laju perekonomian. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah sektor perekonomian yang seperti apa yang harus diperkuat?

Syarat utama dalam pembangunan ekonomi haruslah bertumpu kepada kemampuan perekonomian dalam negeri, tanpa itu prakarsa pembangunan akan terbuang percuma dan tidak bertahan lama. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tidak dapat dicangkokkan dari luar negeri dan bantuan luar negeri hanya sebatas insentif rangsangan saja (Jhingan, 2010).

Menjawab pernyataan M.L Jhingan, UMKM yang merupakan kewirausahaan yang berbasis ekonomi kerakyatan adalah salah satu sektor perekonomian yang harus diperkuat. Hal tersebut dibuktikan UMKM mampu memberikan kontribusi sebesar 55,67% terhadap PDB pada tahun 2008. Hal ini berarti Indonesia dapat menanggulangi krisis perekonomian tahun 2008 silam dan memiliki peran yang signifikan pada sektor riil yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.



Grafik 1. Persentase Jumlah Pelaku UMKM Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2015
Sumber data diolah dari BPS

Uniknya, Kementerian Koperasi dan UKM dalam republik mencatat dari 52 juta

jumlah pelaku UMKM yang tersebar di berbagai Indonesia diisi oleh kewirausahaan perempuan sebesar 60% pada tahun 2015. Artinya dari seluruh jumlah peran UMKM dalam membangun perekonomian bangsa, terdapat 60% bagian hasil dari kontribusi kewirausahaan perempuan.

Namun, nyatanya kontribusi kewirausahaan UMKM perempuan berbanding terbalik dengan kendala yang ada. Banyak terjadi kendala-kendala internal, eksternal, bahkan masih terdapat perlakuan diskriminatif di luar sana. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan pemerintah selanjutnya yang harus segera dibenahi dengan langkah-langkah yang konkret dengan pemilihan yang tepat untuk mengubah tantangan menjadi sebuah peluang perekonomian.

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi uraian yang dapat dijadikan pembahasan, diantaranya:

Bagaimana peran kewirausahaan perempuan dalam pembangunan ekonomi? Dan bagaimana cara memperkuat kewirausahaan perempuan sebagai upaya penopang laju perekonomian?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran kewirausahaan perempuan dalam perekonomian bangsa. Sedangkan tulisan ini diharapkan sebagai tinjauan ulang bagi pemerintah untuk semakin aktif mengembangkan kewirausahaan perempuan, dan membuka mata perempuan untuk terus aktif dalam membangun perekonomian bangsa.

Landasan Teori

Pembangunan Ekonomi

a. Definisi Pembangunan Ekonomi (*Economic Development*)

Tidak ada definisi tunggal mengenai pembangunan ekonomi, namun apabila merujuk

pengertian pembangunan oleh United Nations dalam *development administration: Current approach and trend in public administration for national development* (Cokroamijoyo, 1988), merupakan orientasi dan kegiatan usaha yang tiada akhir. Pembangunan di sini supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas usaha dan kekuatan sendiri.

Definisilain mengenai pembangunan ekonomi hanya dapat dipilah berdasarkan tujuan deskripsi dan proses yang terkandung di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup. Sedangkan untuk proses pembangunan ekonomi adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan penataan kembali dalam rangka meningkatkan kemakmuran ekonomi (Witjaksono, 2006).

Sedangkan Last (2004) dalam Witjaksono (2006) mendefinisikan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

“...the process of creating wealth through the mobilization of human, financial, capital, physical, and natural resources to generate marketable goods and services.” *Definition include:*

1. *The purposeful intervention into an economy to improve economic well-being.*
2. *The process that influences growth and restructuring of an economy to enhance the economic well-being of community .*
3. *The creation of jobs and wealth, and the improvement of quality of life.*

b. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi diawali dengan indikator pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Teori pertumbuhan ekonomi ini berawal dari kajian *The Theory of economic growth*. Namun, tujuan dari pembangunan ekonomi di redefinisi agar memiliki dimensi yang meluas yang tidak hanya semata

peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam memproduksi suatu barang yang dapat berimbas kepada kesejahteraan saja. Kemudian, Dudley Seers menekankan pembangunan ekonomi dalam konteks tujuan sosial, seperti kemiskinan (*poverty*), pengangguran (*unemployment*), dan ketimpangan (*inequality*) (Kuncoro, 2010). Dudley Seers melihat indikator perekonomian tidak hanya sebatas konteks pertumbuhan ekonomi, akan tetapi mengangkat indikator sosial sebagai tujuan tambahan dalam pembangunan ekonomi.

Apabila disimpulkan dari uraian tersebut, tujuan pembangunan ekonomi diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memperkecil pengangguran; dan
4. Menghilangkan ketimpangan;

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Setiap negara memiliki kriteria-kriteria tertentu mengenai UMKM, namun di Indonesia kriteria UMKM dapat ditemui dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2000. Kriteria tersebut merujuk pada sisi asset dan kekayaan diantaranya:

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

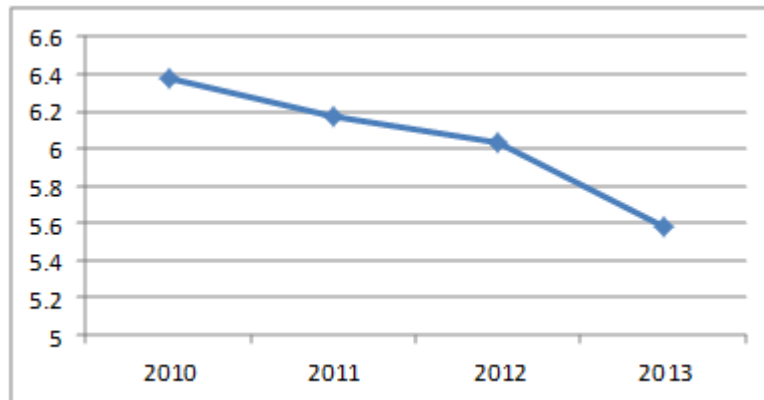
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peranan UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi

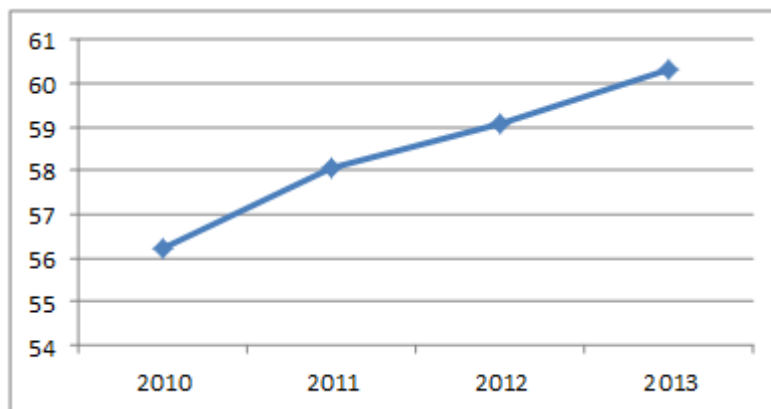
a. Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir, namun pada tahun 2012 sebesar 6.03% pertumbuhan ekonomi merosot jauh sebesar 0.45% pada tahun 2013 atau sebesar 5.58%.

Kompas mencatat, penurunan ini diakibatkan oleh dampak krisis global yang mempengaruhi China dan Amerika Serikat yang berdampak kepada hubungan bilateral Indonesia dalam hal ekspor dan impor. Sehingga, dampak global sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Di lain pihak, kontribusi UMKM terhadap PDB konsisten dengan memberikan tambahan kontribusi dua persen setiap tahunnya. Kompas mencatat PDB yang diterima Indonesia pada tahun 2013 sebesar 9.084 T, sedangkan UMKM memberikan kontribusi PDB sebesar 5.440 T. Hal ini menunjukkan UMKM mampu memberikan sokongan perekonomian pada saat ketidakpastian perekonomian global.



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Sumber data diolah dari BPS



Grafik 2. Kontribusi UMKM pada PDB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persen)
Sumber data diolah dari BPS

Kompas mencatat, penurunan ini diakibatkan oleh dampak krisis global yang mempengaruhi China dan Amerika Serikat yang berdampak kepada hubungan bilateral Indonesia dalam hal ekspor dan impor. Sehingga, dampak global sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Di lain pihak, kontribusi UMKM terhadap PDB konsisten dengan memberikan tambahan kontribusi dua persen setiap tahunnya. Kompas mencatat PDB yang diterima Indonesia pada tahun 2013 sebesar 9.084 T, sedangkan UMKM memberikan kontribusi PDB sebesar 5.440 T. Hal ini menunjukkan UMKM mampu memberikan sokongan perekonomian pada saat ketidakpastian perekonomian global.

b. Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan dari tahun ketahun mengalami penurunan, walaupun cenderung melambat. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 29 juta jiwa mengalami penurunan namun tidak sebesar pada tahun 2009 sebanyak 31 juta jiwa. Walaupun terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, nyatanya penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun, hal ini imbas dari meningkatnya lapangan pekerjaan domestik yang berimbas kepada pendapatan masyarakat.

c. Memperkecil Pengangguran

Peranan lain dari UMKM terhadap pembangunan ekonomi adalah penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan ketimbang usaha besar yang mengalami volatilitas yang tidak menentu. Penyerapan tenaga kerja dimulai dari menjamurnya jumlah unit usaha UMKM yang terus mengalami peningkatan, hal tersebut berkolerasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Usaha besar yang merupakan pemilik kapitalisasi besar di Indonesia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja semaksimal mungkin. Apabila dibandingkan antara pangsa penyerapan tenaga kerja UMKM pada tahun 2013 mampu menyerap sebanyak 96,69%, sedangkan usaha besar hanya 3,01%. Penyerapan tenaga kerja ini memiliki berbagai dampak yang massif bagi

perekonomian Indonesia, salah satunya meningkatnya pendapatan yang berimbas kepada produktivitas dalam sektor riil.

d. Menghilangkan Ketimpangan

Tahun demi tahun koefisien gini di Indonesia mengalami stagnansi namun cenderung mengalami peningkatan walau tidak terlalu besar. Kenaikan koefisien gini terjadi pada tahun 2011 sebesar 0.41 dari 0.38 di tahun 2010 dan mengalami stagnansi di tahun berikutnya. Koefisien gini mengartikan semakin mendekati angka 1 dalam indeks tersebut mengartikan semakin tinggi disparitas distribusi yang terjadi di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi koefisien gini, namun apabila memandang kepada UMKM dan Usaha besar. Jelas terjadi disparitas distribusi antara kedua hal tersebut, hal tersebut berimbas semakin besarnya usaha besar dan semakin kecilnya usaha kecil (UMKM). Karena usaha besar terus memegang kendali besar dalam kapital pasar, yang tidak mendistribusikannya kepada UMKM.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2009	31,02	13,33
Sep-10	29,89	12,36
Sep-11	28,59	11,66
2012	28,07	11,37
2013	28,55	11,47

Sumber data diolah dari BPS

Tabel 2. Jumlah Unit Usaha UMKM

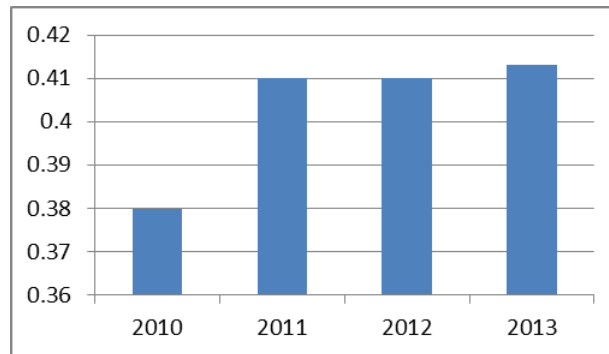
No.	Unit Usaha	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Usaha Mikro	91.729.384	94.957.797	99.859.517	104.624.466
2	Usaha Kecil	3.768.885	3.919.992	4.535.970	5.570.231
3	Usaha Menengah	2.740.644	2.844.669	3.262.023	3.949.385
4	Usaha Besar	2.753.049	2.891.224	3.150.645	3.537.162
	Jumlah	98.238.913	101.722.458	107.657.509	114.144.082

Sumber data diolah dari BPS

Tabel 3. Penyerapan Tenaga Kerja dalam UMKM

No.	Unit Usaha	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Usaha Mikro	53.504.416	54.559.969	55.856.176	57.189.393
2	Usaha Kecil	568.397	602.195	629.418	654.222
3	Usaha Menengah	42.008	44.28	48.997	52.106
4	Usaha Besar	5.150	4.952	4.968	5.066
Jumlah		54.114.821	55.206.444	56.534.592	57.895.721

Sumber data diolah dari BPS



Grafik 4. Indikator Ketimpangan (Koefisien Gini) di Indonesia

Sumber data diolah dari BPS

Kendala dan Permasalahan UMKM dan Kewirausahaan Perempuan

Meski memiliki peranan yang besar, UMKM yang terkhusus UMKM perempuan terdapat beberapa kendala-kendala yang dapat menghambat perekonomian. Kendala-kendala tersebut dibagi menjadi kendala internal dan eksternal. Diantaranya:

a. Kendala Internal

Kuncoro (1998) memandang kendala klasik namun berdampak besar yang belum diselesaikan secara maksimal modal dan keterampilan. Apabila diidentifikasi menjadi:

1) Modal

- a) Modal internal, rendahnya jumlah tabungan wirausaha berimbas kepada sulitnya mengembangkan usahanya dan butuh waktu yang lama untuk memperbesar pasar bisnis.
- b) Akses modal, banyak wirausaha yang sulit mengakses modal. Hal tersebut dikarenakan *track record* usaha yang belum mumpuni mengakibatkan *unbankable* dalam akses dana

- c) Bias gender, penelitian oleh Linda Ariyani dan Yeterina Widi di daerah Salatiga pada tahun 2013, menjelaskan bahwasannya bias gender dalam akses permodalan terjadi pada jumlah nominal modal yang diterima dari pengajuan modal yang semestinya diterima. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pihak laki-laki yang mendapatkan nominal akses modal sesuai dengan pengajuan kredit.

2) Keterampilan

- a) Kendala manajemen keuangan, Linda Ariyani dan Yeterina mencatatkan sulitnya kewirausahaan perempuan mendiversifikasi keuangan untuk produktivitas dan konsumsi.
- b) Pendidikan keterampilan perempuan yang kurang memadai dikarenakan pendidikan formal yang rendah menjadikan sulitnya berinovatif untuk bersaing di pasar bebas.
- c) Penggunaan teknologi yang pesat belum dimanfaatkan oleh sebagian besar perempuan.

b. Kendala Eksternal

Berdasarkan data yang telah disajikan, terdapat beberapa kendala eksternal yang terjadi, dapat diidentifikasi menjadi:

- 1) Iklim usaha yang kurang kondusif menjadikan terhambatnya perkembangan UMKM.
- 2) Lemahnya implementasi hukum diskriminasi gender yang mematikan akses kewirausahaan perempuan dalam mengembangkan usahanya.
- 3) Primordial budaya yang menjadikan sistem paternalisme menjadikan pandangan rendah terhadap perempuan.
- 4) Tidak adanya sinergisitas antara UMKM dan usaha besar dalam membangun ekonomi Indonesia. Usaha besar menciptakan monopoli pasar yang mematikan pergerakan UMKM.

Cepatnya arus globalisasi dapat berimbas kepada ketidaksiapan kewirausahaan untuk mengantisipasinya. Belakangan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia masih terhambat oleh pembangunan infrastruktur dan komunikasi. Kendala-kendala yang cukup kompleks terjadi pada kewirausahaan perempuan dalam UMKM dan UMKM secara umumnya menjadikan hambatan dalam proses pembangunan perkenomian. Budaya yang belum memandang peran perempuan untuk membangun perekonomian menciptakan diskriminasi gender. Padahal, untuk membangun ekonomi nasional seluruh elemen masyarakat harus turut aktif memberikan kontribusi guna dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itu pemerintah harus bergerak cepat dalam membenahi kendala yang ada untuk mengejar ketertinggalan perekonomian. Pembenahan dan penguatan perbekalan secara mikro kepada sumber-sumber daya sangat penting yang dibarengi dengan pembenahan secara makro guna menciptakan

iklim ekonomi yang kondusif, kedua pembenahan harus berjalan secara beriringan.

1. Memperdayakan Perempuan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Mengingat pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kualitas usaha, maka diperlukan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan baik secara formal maupun informal.

a. Pendidikan bagi kewirausahaan perempuan diantaranya agar dapat mengatur keuangan, administrasi dan peluang bisnis. Pendidikan tersebut dapat melalui:

- 1) Pendidikan secara formal maupun informal;
- 2) Pendidikan dengan pengintegrasian *stake holder* terkait maupun dengan universitas-universitas terdekat;

b. Pelatihan kewirausahaan perempuan untuk menciptakan produk yang berkualitas, mengembangkan produk, pemasaran dan pemanfaatan teknologi.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat diharapkan dapat menciptakan wirausahawati yang tangguh, inovatif, efisiensi dan berdaya saing.

2. Memperkuat Akses Permodalan

Perkuatan modal tersebut diantara lain:

- a. Memudahkan lembaga keuangan kepada para wirausaha di daerah-daerah dengan cara mendatangi secara langsung guna mencapai inklusivitas keuangan;
 - b. Memperingan bunga pinjaman dan pengenaan pajak bagi para pelaku UMKM;
- #### 3. Mengoptimalkan Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Kewirausahaan

Jumlah yang besar dalam anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan tidak sebanding dengan penyerapan yang tepat sasaran bagi para pelaku kewirausahaan. Apabila

lebih dioptimalkan diharapkan kewirausahaan perempuan dapat berkembang lebih pesat.

4. Memperkuat Implementasi Hukum Penghapusan Diskriminasi Perempuan

Turut aktifnya pemerintah dalam konvensi penghapusan diskriminasi perempuan oleh PBB menunjukkan keikutsertaannya dalam keberpihakan pemerintah terhadap perempuan dengan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan tertentu. Namun, implementasi di lapangan tidak dapat menjalankan peraturan tersebut. Sehingga, banyak bias gender yang terjadi dalam kehidupan perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan ulang dan penindakan tegas atas penyelewengan peraturan bagi instansi yang melanggar.

5. Menciptakan Badan Pengevaluasi Kewirausahaan UMKM oleh Pemerintah-Pemerintah Daerah

Perlunya pengevaluasi UMKM bertujuan agar tidak matinya bisnis yang dijalankan. Pengevaluasi ini sangat penting agar dapat menjadi tinjauan ulang bagi pelaku usaha maupun pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Di samping itu sebagai badan aspirasi UMKM dan kewirausahaan perempuan mengenai kendala yang terjadi.

6. Legalitas Usaha UMKM

Legalitas perizinan usaha atas UMKM diperlukan guna dapat berhubungan dengan banyak pihak, baik dalam produksi maupun pemasaran agar dapat menghadapi perdagangan bebas terkait langsung dengan tuntutan persaingan bebas.

7. Kepastian Tempat Usaha UMKM

Tempat usaha sangat penting bagi UMKM, karena berguna untuk menciptakan iklim kondusif perekonomian. Kepastian tempat usaha tersebut berupa lokasi di pasar, pertokoan,

lokal sentra industri, lokal pertanian rakyat, dan lokasi-lokasi lain yang wajar dan dapat mengembangkan usahanya.

8. Menciptakan Inkubator Bisnis dengan Sistem Sub-Kontrak dengan Usaha Besar

Terciptanya persaingan antara UMKM dan usaha besar menciptakan ketidak kondusifnya persaingan di Indonesia yang menciptakan disparitas di antara kedua pelaku ekonomi tersebut. Pemerintah perlu menggandeng usaha besar untuk turut aktif mengembangkan UMKM agar dapat meningkatkan taraf UMKM menjadi basis pembangunan perekonomian yang lebih baik.

Penutup

Kewirausahaan perempuan yang mewakili 60% dari total jumlah pelaku UMKM memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan perekonomian bangsa. Peranan kewirausahaan perempuan yang terbingkai dalam UMKM terlihat dalam mengokohkan fundamental bangsa dalam menghadapi krisis tahun 2008. Bukti-bukti lain yang telah terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwasannya UMKM mampu sebagai penopang laju perekonomian. Sebagaimana tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, dan memperkecil ketimpangan.

Namun, peran kewirausahaan perempuan melalui UMKM tersebut tidak dapat bergerak fleksibel dan berkembang sebagaimana UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan domestik. Keterhambatan tersebut harus segera dibenahi dan di sisi lain harus diperkuat fondasi-fondasi kewirausahaan. Pembenahan dan penguatan tersebut dapat dimulai dengan mengatasi masalah klasik kewirausahaan yakni, modal dan keterampilan yang kemudian diiringi

dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif di luar UMKM yang dapat memberikan kebebasan dan kepastian dalam perkembangan UMKM. Di samping itu perlu penegasan dan keturut aktifan pemerintah dalam mengatasi diskriminasi gender, karena hal tersebut dapat merusak dan menghambat akses perkembangan kewirausahaan.

Dengan dipetakannya kendala-kendala permasalahan kewirausahaan perempuan melalui UMKM dan solusinya, untuk menjadikan kewirausahaan perempuan dan UMKM di Indonesia tangguh, inovatif, mandiri, dan berdaya saing global. Semoga dengan penguatan kewirausahaan UMKM perempuan ini dapat menjadi aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perekonomian bangsa lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anonymous. Undang-undang No. 8 Tahun 2000 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- . Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Diakses melalui bps.go.id. pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 20:26 WIB.
- . Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2008 – 2009. Diakses melalui bps.go.id. pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 21:03 WIB.
- . Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013. Diakses melalui bps.go.id pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 21:32 WIB
- . Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2010 – 2011. Diakses melalui bps.go.id pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 21:32 WIB.
- . Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2012 – 2013. Diakses melalui bps.go.id pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 21:54 WIB.
- . Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan. 1970-2013. Diakses melalui bps.go.id. pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 21:33 WIB.
- Bintoro, Cokroamijoyo. *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Karya Unipress. 1998.
- Estu, Suryowati. Tahun 2013 Ekonomi Indonesia Hanya 5.78 Persen. Diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/05/1221161/Tahun.2013.Ekonomi.Indonesia.Hanya.5.78.Persen>. Tanggal 29 Juli. Pukul: 09:21 WIB
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Kuncoro, Mudjarad. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. (tahun 2010?)
- Mahastanti Ariany, Linda dan Nugrahanti Widi, Yeterina. Bias Gender dalam Akses Kredit Perbankan (Studi Pengusaha Mikro dan Menengah di Salatiga). MODUS Vol. 25. 2013.
- Nrfiur. Jumlah Pengusaha UMKM Meningkat. Diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/13/nrfiur-jumlah-pengusaha-umkm-perempuan-meningkat> pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 09:31 WIB
- Witjaksono, Mit. *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan*. JESP Vol. 1, No. 1. 2009.